

# **PENERAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**MARIA SORLURY**

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan ancaman pidana minimum khusus dalam undang-undang narkotika, mengetahui putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan undang-undang dalam perkara narkotika dapat dibenarkan dan mengetahui sistem peradilan pidana khusus peradilan anak terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Lawrence M. Friedman tentang tiga unsur sistem hukum yakni struktur hukum, materi hukum, dan budaya hukum. Selain teori peranan sistem hukum, beberapa teori lain yang dipergunakan seperti teori tujuan pemidanaan, teori pencegahan, dan teori asas legalitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskripsi analisis yaitu melukiskan atau menggambarkan dalam rumusan pengertian terhadap bahan-bahan yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan, yang kemudian dianalisis guna mencapai suatu kesimpulan yang mendekati kebenaran. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa sejarah pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia berawal dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 yang berkembang hingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana memuat ancaman pidana minimal yang hampir terdapat dalam semua pasal yang ada dalam ketentuan pidananya. Ancaman pidana minimal tidak lagi hanya dimaksudkan untuk pemberatan hukuman dan diterapkan dalam keadaan tertentu saja melainkan pada perbuatan pokoknya yang dilakukan oleh setiap orang atau individu yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Pertimbangan yang diambil oleh hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum mencakup pertimbangan yang bersifat yuridis, non yuridis, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan rasa keadilan dan kemanusiaan bagi kepentingan masa depan terdakwa. Saran yang diharapkan penulis adalah tidak ada campur tangan dari pihak manapun terhadap hakim ketika sedang menangani perkara tindak pidana narkotika. Dan setiap dijatuhkan putusan dalam perkara narkotika, seorang hakim senantiasa harus berusaha memasukkan ketiga unsur yang meliputi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam setiap putusannya.

Kata Kunci : Penerapan Pidana Anak

# **APPLICATION FOR CRIME AGAINST NARCOTICS MINORS BY LAW NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS**

**MARIA SORLURY**

## **ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine and analyze specific minimum criminal sanctions provisions in the legislation narcotics, know the verdict that criminalize below the minimum limit of the particular provisions of the law in the case of narcotics can be justified and know the specific criminal justice system of juvenile justice against perpetrators narcotic crime. The theory used in this research is the theory of Lawrence M. Friedman of the three elements of the legal structure of the legal system, legal materials and legal culture. In addition to the theory of the role of the legal system, several other theories that are used as theoretical purpose of punishment, deterrence theory, and the theory of the principle of legality. The method used in this paper is a description of a method of analysis that illustrate or describe the formulation of understanding of the materials obtained from the literature and field research, which is then analyzed in order to reach a conclusion that is closer to the truth. Results of this study concluded that the historical setting narcotic crime in Indonesia originated from Act No. 9 of 1976 which grew to Act No. 35 of 2009, which contains the minimum criminal sanctions contained in almost all the chapters that exist in the criminal provisions. Minimal criminal threats are no longer just meant for weighting penalties and applied in certain circumstances, but on the principle that acts done by any person or persons acting as perpetrators of criminal acts narcotics. Considerations taken by the Tangerang District Court judge in imposing punishment below the minimum threshold includes consideration of juridical, non-juridical, things are burdensome and relieve the defendant, and the sense of justice and humanity for the future interests of the accused. Expected suggestions author is no interference from any party against the judge while it is handling cases narcotic crime. And each dropped decision in the case of narcotics, a judge always must try to incorporate three elements that include an element of justice, legal certainty, and expediency in every decision.